



This project is co-funded by  
the European Union



**PATTIRO**  
SEMARANG

**BOJONEGORO**  
INSTITUTE

**Hivos**  
people unlimited



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA



BUKU PANDUAN  
**ADVOKASI PPRG**  
UNTUK WARGA

# BUKU PANDUAN ADVOKASI PPRG

UNTUK WARGA

Publikasi ini diproduksi atas dukungan Uni Eropa dan Hivos. Konten produk ini seutuhnya merupakan tanggung jawab Transparency International Indonesia (TII) dan tidak mencerminkan pendapat dan sikap Uni Eropa dan Hivos.



# DAFTAR ISI

<b>Pendahuluan</b> .....	I
<b>Bagian I</b> .....	01
Apa itu Gender dan Kesenjangan Gender .....	01
Apa itu PUG, Kesetaraan Gender dan PPRG .....	08
Mengapa perlu PUG dan PPRG .....	15
<b>Bagian II</b> .....	17
Kebijakan dan Mekanisme PPRG .....	17
Hak warga dan Kewajiban Negara.....	19
Hakekat dan Logika Anggaran.....	21
Proses PPRG.....	24
Cara mengidentifikasi kesenjangan gender di proses PPRG .....	32
Contoh identifikasi kesenjangan gender di sector pendidikan dan kesehatan .....	33
Cara terlibat dalam musrenbang agar responsive gender .....	34
Cara melakukan analisis APBD dan APBDesa yang Responsif Gender .....	37
Contoh hasil analisis PPRG .....	44
<b>Bagian III</b> .....	50
Pemantauan dan Evaluasi PPRG .....	50
Strategi Advokasi PPRG .....	51
Ranah Kebijakan.....	51
Ranah Komunitas .....	52
Kerja-Kerja Pendukung .....	53
Aktor Advokasi PPRG .....	55
Arena Advokasi PPRG .....	55
Tahapan Advokasi PPRG .....	56
Integrasi Gender dalam Musrenbang .....	56
Identifikasi Langkah Promosi PPRG .....	57
Perencanaan dan Penganggaran.....	57
Form Rencana Tindak Lanjut .....	57



# PENDAHULUAN

## **Partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan adalah syarat mutlak dalam sistem demokrasi.**

---

Suara warga wajib didengarkan dan dijadikan acuan dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan. Partisipasi warga diartikan sebagai proses, cara, sarana bagi warga, terutama kelompok miskin dan marginal untuk turut terlibat dan turut serta mengendalikan sumber daya dan (alokasinya) melalui berbagai proses penyusunan kebijakan publik yang berpengaruh langsung ke dalam kehidupan mereka (Nierras et al, 2002). Partisipasi tidak dipandang sebagai tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan.

Partisipasi dilihat sebagai cara untuk mengubah relasi sosial ekonomi dan politik yang timpang.

Salah satu upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dan kelompok marginal lainnya seperti difabel, anak dan lansia adalah mendorong partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan. Keterlibatan kelompok marginal dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat bawah sangat penting. Namrata (2004) mengatakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan dibutuhkan peningkatan kapasitas, konseling, dan informasi yang selalu update. Perempuan sangat perlu untuk berpartisipasi dalam proses gerakan sosial, karena bertujuan untuk mendesak kebijakan isu-isu strategis untuk mengatasi persoalan yang sering dihadapi oleh kelompok perempuan miskin yaitu kesehatan, pendidikan, pertanian dan ekonomi, hak sipil dan politik.

Banyak studi yang menjelaskan bahwa keterlibatan kelompok marginal dalam proses pembangunan akan membawa hasil yang berbeda bagi mereka. Contoh keterlibatan kelompok perempuan yang selama ini perempuan masih termarginal dalam proses pembangunan. Agenda atau isu yang dibawa oleh laki-laki dan perempuan ketika berpartisipasi dalam kebijakan hasilnya berbeda, isu kebutuhan dasar, aborsi, pendidikan, dan tindak kriminal akibat minuman keras

banyak diusung oleh perempuan. Sementara laki-laki banyak membahas soal pajak, ekonomi makro, lingkungan dan kebijakan luar negeri. Dalam pendorong partisipasi kelompok perempuan, dimana tahapan ini juga bisa digunakan untuk kelompok marginal lainnya seperti difabel dan warga miskin dalam perencanaan dan penganggaran desa, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu:



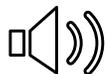
## **Membangun Gerakan Penyadaran**

Langkah-langkah yang agresif dan progresif. langkah-langkah tersebut adalah kelompok perempuan harus dimotivasi dan dimobilisasi menjadi sebuah kelompok penekan. Sangat penting untuk mengembangkan "*critical mass*" atau kesadaran kritis karena perempuan akan mendapatkan kekuatan dari gerakan yang berusaha didorong tersebut



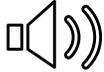
## **Akses**

Mengeliminasi hambatan akses perempuan terhadap sumber daya merupakan langkah penting menuju pemberdayaan. Untuk sukses mendorong perempuan menuju kesetaraan dan pemberdayaan sangat tergantung pada tingkat kepedulian dan hambatan yang mereka rasakan. Hal ini karena kesadaran menyediakan mereka akses dengan tindakan-tindakan dasar untuk mengatasi dan membongkar rintangan yang menahan mereka kembali adalah langkah penting.



## **Partisipasi Aktif**

Pada tingkat partisipasi perempuan dan kelompok marginal harus dapat mengambil bagian memiliki kuasa untuk mempengaruhi sumberdaya. Mereka harus bisa mengetahui dan memanfaatkan arena dan ruang partisipasi yang bisa dimasuki. Cornwall dan Gaventa (2002) menyatakan bahwa ruang-ruang tersebut menawarkan potensi besar untuk membangun bentuk-bentuk baru dari partisipasi warga.



## Partisipasi Aktif

Bagaimana warga negara "membuat dan membentuk" kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun ada kebutuhan untuk lebih memahami kompleksitas kekuasaan, representasi dan klaim untuk mengetahui arena partisipasi yang dimainkan. Titik pertama bahwa partisipasi dalam proses politik membutuhkan rasa hak untuk melakukannya dan rasa bahwa partisipasi tersebut akan berdampak pada proses politik, kontrol struktur partisipatif dan proses yang terkait, mendefinisikan ruang, aktor, agenda, dan prosedur.

Samadhi dkk (2009:149) mengatakan bahwa mempromosikan lembaga-lembaga representatif seperti forum warga termasuk forum perempuan, forum difabel untuk mendorong masyarakat berpartisipasi secara langsung di lembaga-lembaga pemerintah memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut adalah akar rumput memiliki akses ke partisipasi langsung, ruang-ruang dan lembaga-lembaga lokal yang digunakan berlangsung terbuka, non partisan, dan pluralistis. Oleh karena itu, masyarakat yang termarginalisasi akan lebih tertarik untuk berpartisipasi.



## Kontrol

Cornwall dan Coelha (2002:5) mengatakan bahwa: *Enabling citizen to engage directly in local problem solving activities and to make their demand directly to state bodies is believed to improve understanding, and contribute to improving the quality of definition and implementation of public programs and policies.* Artinya bahwa mengaktifkan warga negara untuk terlibat langsung dalam kegiatan pemecahan masalah lokal dan untuk membuat permintaan secara langsung kepada badan-badan negara diyakini untuk meningkatkan pemahaman, dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas definisi dan pelaksanaan program dan kebijakan publik.

Dalam konteks kebijakan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, maka pendekatan perencanaan penganggaran harus melibatkan secara langsung kelompok-kelompok masyarakat miskin dan marginal untuk menyampaikan kebutuhannya yang paling mendesak. Konsep penganggaran partisipatif sebenarnya tidak tunggal, dan sangat beragam dari berbagai wilayah. Secara umum, penganggaran partisipatif adalah suatu mekanisme atau proses dimana masyarakat yang memutuskan dan memberikan kontribusi terhadap keputusan yang dibuat berdasarkan sumberdaya publik yang tersedia. Penganggaran partisipatif adalah sebuah proses demokrasi langsung, sukarela dan universal, di mana orang dapat berdebat dan memutuskan anggaran dan kebijakan publik. Partisipasi warga negara tidak terbatas pada tindakan pemungutan suara untuk memilih eksekutif atau legislatif, tetapi juga memutuskan tentang pengeluaran prioritas dan kontrol

pengelolaan pemerintah (UN Habitat,2004).

Prinsip dari penganggaran partisipatif adalah universal participation, yaitu semua warga negara dapat berpartisipasi terlepas dari status sosial ekonomi, dan kelompok yang terorganisir memainkan peran yang penting dalam proses penganggaran partisipatif, dan disinilah penting untuk melibatkan kelompok-kelompok marginal atau masyarakat miskin. Selain itu, gender resposif juga menjadi prinsip untuk memastikan partisipasi perempuan dan laki-laki yang seimbang, sehingga di dalam penganggaran akan jelas siapa penerima manfaat dari program. Selain itu, perlu tindakan afirmasi untuk menjamin partisipasi dan kekuasaan untuk proses pengambilan keputusan. (DFID,2002). UN Habitat (2004) menjelaskan Participatory Budgeting (PB) membutuhkan sejumlah prakondisi atau prasyarat yaitu:

- 1 Political will dari pimpinan daerah atau para pengambil kebijakan utama.
- 2 Adanya kepentingan dari warga untuk terlibat.
- 3 Adanya mekanisme yang jelas tentang tahapan dan periode waktu, aturan untuk pengambilan keputusan, metode mendistribusikan tanggungjawab, pembagian peran dan wewenang dari masing-masing aktor serta komposisi dewan anggaran partisipatif. Aturan tersebut tidak diputuskan secara sepihak namun harus ditentukan dengan partisipasi penuh dari suatu populasi tertentu.
- 4 Adanya kemauan untuk membangun kapasitas masyarakat dan pejabat tentang penganggaran partisipatif, ada kesepakatan untuk membangun kesepakatan tentang alokasi.  
  
Menyebarkan informasi melalui semua kemungkinan yang bisa dilakukan, misalnya tanggal, tempat pertemuan dan aturan main yang telah ditetapkan.
- 5 Adanya prioritas tuntutan, yang ditetapkan bersama dengan masyarakat yang disesuaikan dengan alokasi yang tersedia untuk memastikan distribusi sumberdaya yang lebih adil. Penentuan prioritas tuntutan ini dilakukan dengan partisipasi penuh dari masyarakat suatu populasi tertentu dan kemudian disesuaikan kebutuhannya setiap tahun, berdasarkan hasil dan fungsi dari proses tersebut.

Adanya prioritas tuntutan, yang ditetapkan bersama dengan masyarakat yang disesuaikan dengan alokasi yang tersedia untuk memastikan distribusi sumberdaya yang lebih adil. Penentuan prioritas tuntutan ini dilakukan dengan partisipasi penuh dari masyarakat suatu populasi tertentu dan kemudian disesuaikan kebutuhannya setiap tahun, berdasarkan hasil dan fungsi dari proses tersebut.

Peran keterlibatan partisipan sangat penting untuk menghindari dominasi keputusan masyarakat oleh elit lokal, gagalnya pemberian ruang bagi kaum marginal, serta menghindari bias partisipasi. Dominasi keputusan masyarakat oleh elit dapat menyebabkan adanya perilaku mengambil untung secara berlebihan dan menggagalkan relasi timbal balik antara pemilik dengan wakilnya dalam mekanisme pendelegasian. Kegagalan pemberian ruang bagi kaum marginal menyebabkan partisipasi semu dan buruknya kolektifitas sebagai awal dari komitmen sosial. Pemberian ruang bagi kaum marginal adalah tahapan meningkatkan kapasitas dan pendayaan bagi lapisan masyarakat yang terisolir secara sosial, ekonomi, dan geografi (Rahman, 2011).

Koalisi Perempuan Indonesia dalam Hari Perempuan Internasional 2016 mencatat bahwa ketimpangan gender masih menjadi catatan buruk terhadap kondisi di Indonesia. Beberapa ketimpangan tersebut adalah: Angka Kematian Ibu Melahirkan masih tinggi yaitu

359/100.000, partisipasi politik perempuan tidak pernah mencapai kuota 30 persen, ketimpangan pendidikan, pelanggaran hak-hak pekerja rumah tangga, perdagangan perempuan dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Data menunjukkan pada tahun 2014 kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai angka 293.220 kasus. Masalah yang lain terjadi kepada perempuan penyandang disabilitas, buruh perempuan, perempuan nelayan, perempuan buruh migran, anak buruh migran, anak difabel dan lain-lain.

Masalah tersebut banyak menimpa perempuan pedesaan dan anak pedesaan yang karena kondisi kemiskinan menjadikan mereka rentan untuk tidak mampu mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi ketimpangan gender yang terjadi dengan membekali warga terutama kelompok-kelompok perempuan tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Tahapan ini membutuhkan langkah-langkah strategis dan taktis agar perempuan dan kelompok marginal lainnya mampu melakukan advokasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan desa. Panduan ini diharapkan dapat membekali warga dalam melaksanakan advokasi PPRG baik ditingkat kabupaten/kota maupun di tingkat kelurahan dan desa.

# BAGIAN 01



## APA ITU GENDER DAN KESENJANGAN GENDER

**Dalam berbagai pelatihan gender bersama dengan warga, istilah gender tidak dikenali oleh mereka.**

Dalam berbagai pelatihan tentang gender bersama dengan warga, istilah gender tidak dikenali oleh mereka. Namun, jika mereka diberikan gambar tentang berbagai aktivitas sehari-hari baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, siapa yang paling sering melakukan aktivitas tersebut, siapa yang memiliki beban lebih banyak, mereka sangat antusias untuk menjawab pertanyaan. Contoh: siapa yang menguasai sumber daya berikut ini (gambar ternak): ibu-ibu dengan kompak akan menjawab: bapak bapak atau laki-laki. Namun, ketika disuguhkan gambar tentang dapur dan sumur, perempuan dengan kompak akan menjawab bahwa

perempuanlah yang memiliki kuasa atas ruang tersebut. Situasi ini tidak sepenuhnya salah karena adanya pembagian peran dalam rumah tangga bahwa perempuan mengerjakan urusan domestik serta laki-laki mengerjakan urusan produktif ataupun mencari nafkah.

Istilah seks digunakan untuk menyebutkan jenis kelamin dan kromosom yang dimiliki seseorang saat mereka lahir. Baik laki-laki maupun perempuan lahir dengan jenis seks tertentu yang ditandai dengan fitur-fitur fisik dari organ reproduksi mereka; seks merupakan hal biologis. Perempuan memiliki vagina dan rahim, sementara laki-laki terlahir dengan memiliki penis dan sperma. Sementara itu, peran gender adalah hal yang berbeda dengan fungsi-fungsi biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki berdasarkan seks (jenis kelamin) mereka.

Gender merupakan perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan

pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya tempat laki-laki dan perempuan tersebut hidup memberikan atribut-atribut sosial kepada laki-laki dan perempuan. Atribut ini disebut gender, yang sifatnya kontekstual dan bisa berubah.

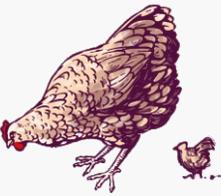
Atribut sosial ini kemudian menjadi dasar dalam pembagian kerja dan peran dalam masyarakat tersebut. Misalnya: laki-laki pencari nafkah atau kepala keluarga; perempuan terbatas sebagai ibu rumah tangga atau di wilayah domestik. Atribut sosial tersebut menyebabkan kesenjangan gender atau ketidakadilan gender yaitu kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kesenjangan gender juga dapat diartikan sebagai berbagai perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses dan kontrol atas sumber-sumber daya penting, misalnya perbedaan dalam pekerjaan dan upah dimana laki-laki

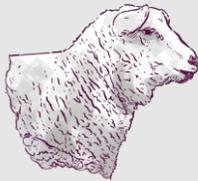
menerima lebih besar dibandingkan perempuan untuk sebuah pekerjaan yang sama. Contoh kesenjangan gender dalam pembangunan adalah ketidakseimbangan hubungan antara perempuan dan laki-laki di dalam proses pembangunan, dimana perempuan cenderung tidak berpartisipasi dalam proses pembangunan (perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi).

Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan dalam situasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang yang berupa subordinasi atau kedudukan bawahan, marginalisasi atau peminggiran, beban ganda, kekerasan pada perempuan serta pelabelan (stereotype). Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:

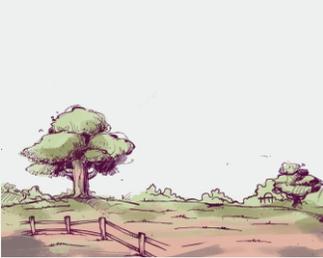
- **Salah satu jenis kelamin dirugikan,**
- **Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya,**
- **Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain,**
- **Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.**

## Panduan Identifikasi Konsep Gender

Gambar	Siapa yang paling dominan dalam pengelolaan sumberdaya berdasarkan gambar		Siapa yang berperan di dalam ranah domestik (internal rumah tangga), publik (masyarakat), produktif (pencari nafkah), reproduktif (hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi) Apa akibat atau dampak yang terjadi karena adanya yang dominan?
	Laki-Laki	Perempuan	
			
			
			
			

Gambar	Siapa yang paling dominan dalam pengelolaan sumberdaya berdasarkan gambar		Siapa yang berperan di dalam ranah domestik (internal rumah tangga), publik (masyarakat), produktif (pencari nafkah), reproduktif (hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi) Apa akibat atau dampak yang terjadi karena adanya yang dominan?
	Laki-Laki	Perempuan	
			
			
			
			
			

Gambar	Siapa yang paling dominan dalam pengelolaan sumberdaya berdasarkan gambar		Siapa yang berperan di dalam ranah domestik (internal rumah tangga), publik (masyarakat), produktif (pencari nafkah), reproduktif (hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi) Apa akibat atau dampak yang terjadi karena adanya yang dominan?
	Laki-Laki	Perempuan	
			
			
			
			
			

Gambar	Siapa yang paling dominan dalam pengelolaan sumberdaya berdasarkan gambar		Siapa yang berperan di dalam ranah domestik (internal rumah tangga), publik (masyarakat), produktif (pencari nafkah), reproduktif (hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi) Apa akibat atau dampak yang terjadi karena adanya yang dominan?
	Laki-Laki	Perempuan	
			
			
			
			
			

Gambar	Siapa yang paling dominan dalam pengelolaan sumberdaya berdasarkan gambar		Siapa yang berperan di dalam ranah domestik (internal rumah tangga), publik (masyarakat), produktif (pencari nafkah), reproduktif (hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi) Apa akibat atau dampak yang terjadi karena adanya yang dominan?
	Laki-Laki	Perempuan	
			
			
			
			

### **Catatan untuk CO (Community Organizer):**

- Jika dalam proses pendampingan di lapangan tidak tersedia alat dan bahan untuk identifikasi, CO dapat mengajak warga untuk melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekitar lokasi pendampingan.
- Gunakan bahasa yang mudah dan sederhana sesuai dengan konteks lokal, amatilah situasi dan kondisi terkait dengan budaya setempat untuk mengetahui situasi awal kesenjangan gender. Situasi kesenjangan gender di setiap daerah dapat berbeda-beda.
- Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi terkait gender dan agama, kuncilah dengan situasi kesenjangan gender dalam pembangunan di desa atau yang paling dekat dalam kehidupan lingkungan masyarakat.

## **APA ITU PENGARUSUTAMAAN GENDER, KESETARAAN GENDER DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**

**Langkah untuk memastikan tidak adanya kesenjangan gender dan ketidakadilan gender adalah mengarusutamakan gender ke dalam berbagai aspek kehidupan.**

---

Salah satu langkah yang sudah dilakukan di Indonesia adalah Pengarusutamaan Gender yaitu proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional).

Dalam Permendagri No.15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah, Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Permendagri tersebut diperbaharui melalui Permendagri 67 tahun 2011.

Permendagri tersebut dalam pasal 1 ketentuan umum juga menjelaskan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan Gender juga diartikan sebagai laki-laki dan perempuan memiliki dan mendapatkan penghargaan yang setara sebagai manusia di dalam berbagai aspek kehidupan dan sama-sama mendapatkan akses, mampu berpartisipasi dan memiliki kontrol serta mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan. Sedangkan Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

**Indikator kesetaraan gender yang bersifat makro biasanya mengacu pada indikator yang disepakati secara nasional, misalnya:**

- Indeks Pembangunan Gender/IPG (*Gender Development Index-GDI*) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
  - Variabel GDI: angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan
- Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (*Gender Empowerment Measures-GEM*) merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dan kehidupan ekonomi dan politik.

- Variabel GEM: partisipasi perempuan dalam politik, partisipasi dalam bidang ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs (*Sustainable Development Goals*) terutama **Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan**, dengan target:
  1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja.
  2. Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (*trafficking*) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.
  3. Menghapuskan segala praktik yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan.
  4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional.

5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.
6. Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya.
7. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level.

---

Indikator pada tingkat **output**, yaitu indikator yang merupakan hasil langsung dari **suatu kegiatan**, misalnya: Rasio laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelatihan agribisnis, Perempuan yang terlibat dalam Musrenbang. Indikator spesifik gender, yakni indikator yang secara khusus terkait dengan satu jenis kelamin saja, misalnya: Angka kekerasan terhadap perempuan, Jumlah kasus *trafficking* di kalangan perempuan



### **Analisis Gender** (Analisis Harvard)

Merupakan alat suatu analisis gender yang mempertanyakan siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi pembangunan (kebijakan/program/kegiatan/dana). Terdiri dari empat fokus analisis yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat.



## Akses

Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.



## Partisipasi

Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi?



## Kontrol

Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut.



## Manfaat

Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan untuk perempuan? Proses analisis ini akan menghasilkan data yang digunakan sebagai data dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan.

Dalam tahapan ini, penting untuk menyediakan data pembuka wawasan. Data pembuka wawasan adalah data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti. Data pembuka wawasan sebaiknya merupakan data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan. Namun tidak semua data pembuka wawasan merupakan data pilah menurut jenis kelamin, tetapi merupakan data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin,

misalnya data tentang kekerasan terhadap perempuan, angka kematian ibu. Data dapat berupa data dan informasi (hasil studi, hasil intervensi kebijakan, program, kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan). Data dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif hasil observasi, FGD, wawancara mendalam atau riset kualitatif. Setelah data pembuka wawasan tersedia, dapat dilakukan analisis gender dengan metode Harvard sebagaimana dijelaskan dalam kotak di atas.

**Lembar Kerja Analisis GAP (Gender Analisis Patway),  
Termasuk Identifikasi Kerangka Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran**

	Tahapan	Penjelasan
Isu Gender	<b>Kebijakan/ Program/ Kegiatan</b>	Pemilihan/penentuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang akan dianalisis dengan fokus melihat pada tujuan dari kebijakan/program/kegiatan tersebut.
	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	Penggunaan data pembuka wawasan untuk memberi gambaran kesenjangan gender terkait dengan kebijakan/program/kegiatan tersebut. Data bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif.
	<b>Kesenjangan</b>	Menemukanali isu gender dengan menggunakan alat analisis Harvard, yakni: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat laki-laki dan perempuan terkait dengan kebijakan/program/kegiatan tersebut
	<b>Internal</b>	Menemukanali isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya persepsi), mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut?
	<b>Eksternal</b>	Menemukanali isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya.
Rencana Aksi	<b>Perumusan Kembali</b>	Perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan sehingga tujuannya menjadi lebih responsif gender.  <b>Rumuskan:</b> - <i>outcome</i> (tingkat program) - dampak - <i>output</i> (tingkat kegiatan)
	<b>Rencana Aksi</b>	Penyusunan rencana aksi yang responsif gender yang merujuk pada hasil reformulasi tujuan  <b>Rumuskan rencana aksi</b>

	Tahapan	Penjelasan
Pengukuran Hasil	<b>Baseline</b>	Penetapan <i>baseline</i> , yaitu data dasar yang dipilih sebagai titik awal untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tersebut. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang ada pada langkah 2 <b>Rumuskan nilai <i>baseline</i></b>
	<b>Rencana Aksi</b>	Penetapan indikator gender, yakni ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan tingkat perubahan pada tingkatan hasil (dampak, <i>outcome</i> dan <i>output</i> ) <b>Rumuskan nilai target kinerja</b>

### Ciri untuk mengidentifikasi isu Gender

- Menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan dan kelompok gender minoritas lainnya (lansia, anak, penyandang disabilitas, perempuan, warga miskin)
- Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan
- Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi, marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan)
- Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah)
- Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat)
- Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan
- Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain)
- Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan.

### Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan akses, partisipasi dan pengambilan kebijakan dilakukan dengan

mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi laki-laki, dan perempuan dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, PPRG mensyaratkan adanya kemauan politik dan komitmen pembuat kebijakan publik.

### Perencanaan Responsif Gender

- Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
- Bisa mempertajam analisis tentang kondisi daerah karena terpetakan kesejangan dalam pembangunan manusia, laki-laki dan perempuan.
- Membantu mempertajam target group/ kelompok sasaran karena data terpilah.
- Tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan bilamana analisis gender diterapkan.

Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak mampu menjawab semua isu kesenjangan gender di berbagai bidang.

### Penganggaran Responsif Gender

- ARG (Anggaran Responsif Gender) bukanlah anggaran terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak sama dengan anggaran untuk perempuan
- Tidak selalu berarti penambahan alokasi
- ARG menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender
- ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki secara memadai

Anggaran responsif gender adalah anggaran yang memberi atau mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal :

- Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.
- Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

## MENGAPA PERLU PUG DAN PPRG

### **Penyelesaian persoalan kesenjangan gender harus dilakukan oleh berbagai pihak, baik lintas sektor maupun lintas aktor.**

Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi yang sangat penting agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi dan komprehensif. Misalnya: kasus balita gizi buruk tidak bisa diselesaikan oleh dinas kesehatan saja, namun juga melibatkan dinas lain maupun pihak lain, misalnya terkait dengan ketersediaan pangan untuk pemenuhan gizi balita yang memadai dibutuhkan dinas pertanian dan para aktor penggerak di tingkat posyandu, tingkat sekolah dan lain sebagainya.

Sementara itu, pentingnya PPR adalah untuk memastikan ketersediaan sumberdaya publik dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai kesetaraan gender dengan pelibatan publik mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional.

#### **Tujuan PPRG dapat digambarkan sebagai berikut:**

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan percepatan terwujudnya KKG

- Meningkatkan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai anggaran dan program
- Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja / pengeluaran pembangunan
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas dampak gender dalam anggaran pemerintah
- Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki - laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
- Menyesuaikan berbagai program dan anggaran untuk mendorong kesetaraan gender.
- Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki - laki, perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi) dapat diakomodasi ke dalam belanja/pengeluaran

## Panduan Identifikasi Program Pengarusutamaan Gender

- Mintalah kepada warga menyebutkan masalah kesenjangan gender yang mereka rasakan (gunakan ciri-ciri isu gender)
- Mintalah kepada warga menyebutkan apa saja potensi atau kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi persoalan kesenjangan gender tersebut.
- Mintalah kepada warga untuk menyebutkan apa solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berdasarkan potensi yang dimiliki.
- Mintalah kepada warga untuk menyebutkan program-program yang mereka dapatkan untuk mendorong kesetaraan gender ditingkat RT, dusun, desa/kelurahan ataupun di tingkat kabupaten/kota.
- Catat nama-nama program yang disebutkan oleh warga, diskusikan apakah sudah menjawab persoalan kesenjangan gender yang mereka rasakan.

# BAGIAN 02



## KEBIJAKAN DAN MEKANISME PPRG

### Kebijakan

- Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 menegaskan PUG dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah
- PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 3, menjelaskan bahwa: perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender, dalam menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender.
- Permendagri No. 15 tahun 2008 memuat instruksi implementasi PUG di daerah, konsep perencanaan dan penganggaran responsif gender, kelembagaan PUG. Secara khusus: Pasal 4 Ayat 1: Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender; perencanaan pembangunan perspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis OPD dan Renja OPD. Pasal 4 Ayat 2: penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus dilakukan melalui analisis gender.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

## Mekanisme PPRG

- Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 menegaskan PUG dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah

## Pendekatan Perencanaan Pembangunan

- Sebelum melakukan identifikasi proses perencanaan penganggaran responsif gender, lakukanlah identifikasi apa saja hak dasar warga dan kewajiban negara.



## Hak Warga dan Kewajiban Negara

### Hak Warga

#### 10 Hak Dasar Warga

- Hak atas pangan;
- Hak atas layanan kesehatan;
- Hak atas layanan pendidikan;
- Hak atas pekerjaan dan berusaha;
- Hak atas perumahan;
- Hak atas air bersih dan aman serta sanitasi yang baik;
- Hak atas tanah;
- Hak atas sumber daya alam;
- Hak atas rasa aman;
- Hak untuk berpartisipasi.

#### Dasar Hukum

- UU Dasar 1945
- UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
- UU No.12 Tahun 2005 tentang kovenan internasional hak-hak sipil dan politik
- UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW

### Kewajiban Warga

#### Kewajiban Negara

- Mengambil langkah-langkah secara mandiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dalam bidang ekonomi dan teknis.
- Memaksimalkan sumber daya yang tersedia
- Secara bertahap mencapai realisasi sepenuhnya atas HESB (Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya).

#### Kewajiban Generik

- Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*)
- Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).
- Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).

### Hak Perempuan

- Negara mengikatkan diri menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan – terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
- Kesempatan yang sama – menikmati manfaat dan hasil yang sama
- Perlakuan yang sama – mendapat akses dan manfaat yang sama – melalui penciptaan lingkungan yang kondusif – tindakan khusus sementara.
- Hak yang sama dalam: keluarga, kerja, upah, waris, pemilikan, kewarganegaraan, perwakilan, pengambilan keputusan, partisipasi POLEKSOSBUD (Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya).

### **Pasal 1 Konvensi CEDAW:**

- "Setiap perbedaan, pengucilan, pembatasan, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan, penggunaan hak - hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya, oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan perempuan.

- (1) Konvensi menetapkan bahwa perempuan memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus dinikmati oleh perempuan atas dasar persamaan (kesetaraan dan keadilan) dengan pria terlepas dari status perkawinan (Pasal 1)
- (2) Konvensi menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia
- (3) Konvensi mewajibkan negara untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi perempuan (Pasal 2)

### **Pasal 2**

- Memasukan prinsip kesetaraan antara pria dan perempuan dalam sistem hukum.
- Menegakan peradilan dan institusi publik lainnya untuk menjamin perlindungan yang efektif pada perempuan dari setiap tindak diskriminasi
- Menjamin penghapusan segala perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang, organisasi, dan perusahaan.
- Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
- Kehidupan politik dan publik (Pasal 7)
- Mewakili negara di tingkat internasional dan turut serta dalam pekerjaan organisasi internasional (Pasal 8)
- Kewarganegaraan bagi perempuan dan anak-anak mereka (Pasal 9)
- Pendidikan, termasuk hak untuk turut serta dalam kurikulum dan ujian yang sama, serta staf pengajar, gedung dan peralatan sekolah dengan mutu yang sama (Pasal 10)
- Pekerjaan, termasuk hak atas kesempatan kerja yang sama, secara bebas memilih profesi dan pekerjaan, upah yang sama termasuk tunjangan, dan perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, maupun hak atas jaminan sosial, perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan fungsi reproduksi (Pasal 11)
- Pemeliharaan kesehatan, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan keluarga berencana, kehamilan dan menyusui. (Pasal 12)
- Hak atas tunjangan keluarga, pinjaman bank dan bentuk-bentuk lain kredit permodalan, kegiatan rekreasi, olah raga dan lain-lain (Pasal 13)
- Perkawinan dan hubungan keluarga, termasuk hak untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih pasangan, serta hak dan kewajiban yang sama sebagai orang-tua dalam urusan yang terkait dengan anak-anak mereka. (Pasal 16)
- Konvensi memberikan perhatian pada masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan perdesaan dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah perdesaan sehingga mereka dapat turut serta dalam, dan menikmati manfaat dari pembangunan desa (Pasal 14)
- Menjamin persamaan hak perempuan dan pria di muka hukum, kecakapan hukum yang sama, dan menghormati mobilitas orang-orang serta pilihan tempat tinggal dan domisili (Pasal 15)



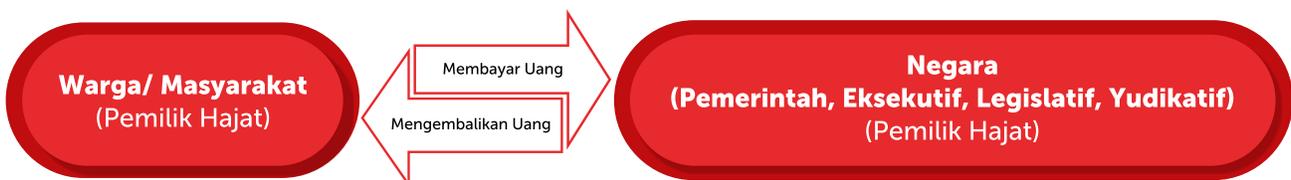
## Panduan CO

- Diskusikan apa yang harus dilakukan oleh negara untuk pemenuhan hak warga, bagaimana situasi yang terjadi saat ini, apa yang harus dilakukan oleh warga dan negara.
- Mintalah kepada warga untuk menyebutkan apa saja yang telah dibayarkan kepada negara (pajak listrik, pajak motor, retribusi pasar dll).
- Mintalah kepada warga digunakan untuk apa saja uang yang sudah dibayarkan tersebut.
- Jelaskan tentang Hakekat dan Logika Anggaran, diskusikan dengan warga.

## Hakekat dan Logika Anggaran

**Anggaran adalah wujud konkret kewajiban negara untuk pemenuhan hak warga. Warga harus paham bahwa anggaran yang dikelola negara sejatinya adalah anggaran milik rakyat yang dibayarkan melalui berbagai jenis pajak dan retribusi.**

Ibarat sebuah hajatan, pemilik hajatan adalah rakyat, sedangkan pemerintah adalah panitia yang diberi mandat untuk mengelola hajatan rakyat dengan sebaik-baiknya. Logika anggaran adalah digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk pemenuhan hak warga dengan sistem dan tata kelola yang benar tanpa dikorupsi serta secara terbuka/transparan, melibatkan warga dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).



### Prinsip:

Negara diberi "amanah" oleh rakyat untuk mengelola uang dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

## Perbedaan Pajak dan Retribusi

Pajak	Retribusi
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak,</li><li>■ Biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan di suatu negara,</li><li>■ Karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut,</li><li>■ Pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ada sanksi jika melanggar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada pembayar retribusi.</li><li>■ Tidak bersifat memaksa, tidak ada sanksi, dan dibayarkan orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tertentu</li></ul>

## Fungsi Anggaran



**Perencanaan:** Merencanakan pendapatan, pengeluaran serta pembiayaan



**Pengendalian:** Alat mengukur, mengontrol, dan mengevaluasi pelaksanaan



**Fungsi Alokasi:** Sumber daya untuk program dan kegiatan bentuk layanan publik sebagai fungsi pelayanan masyarakat.

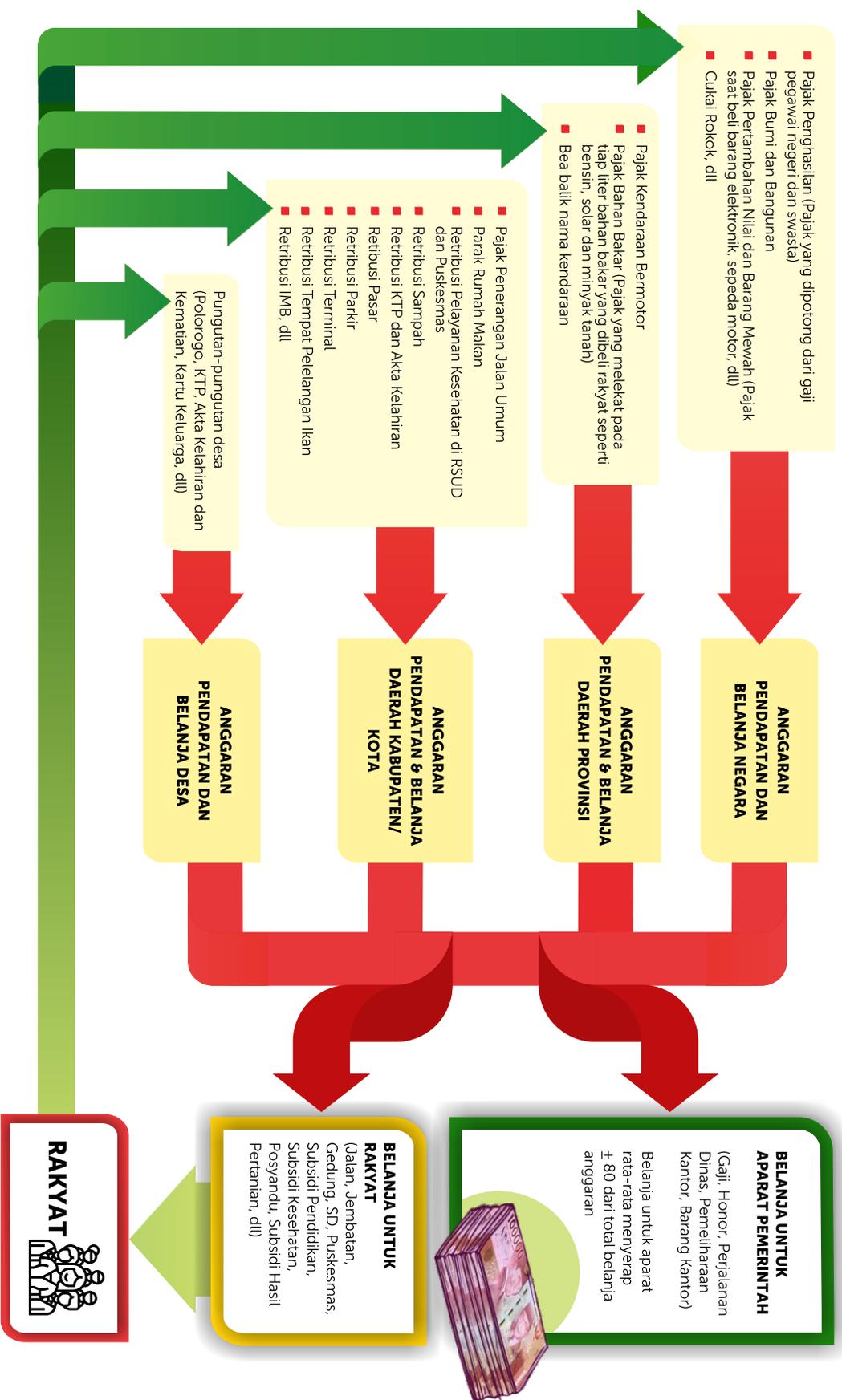


**Fungsi Distribusi:** Menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.



**Fungsi Stabilisasi:** Dari fungsi yg ekstrem menuju ke keseimbangan, misal: bencana, harga komoditas tertentu anjlok.

## Diagram Aliran Dana Publik



## Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Partisipatif dan Responsif Gender

### Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

- Perencanaan strategis terdiri dari Perencanaan Jangka panjang Daerah (RPJPD) dan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) yang disusun setiap lima tahun.
- Perencanaan operasional terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang disusun setiap tahun.
- RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Di level OPD, Rencana Strategis (Renstra) OPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD.
- Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan di level daerah dengan di level OPD, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, dan RKPD akan diacu dalam penyusunan Renja OPD. Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

### Dokumen Penganggaran Daerah:

- KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya pada periode satu tahun. PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati DPRD.
- RKA OPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Daerah): dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra OPD yang bersangkutan dalam waktu satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- DPA OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) adalah Dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.

### Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), disusun untuk periode 6 tahun.
- Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) RPJMDesa akan dijabarkan ke dalam RKPDesa yang disusun setiap tahun.
- RAPBDesa (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa): Dokumen Rancangan yang memuat Rincian Pendapatan Dan Belanja Desa dalam waktu satu tahun.
- APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa): Rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

## Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

- RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): Dokumen Rancangan yang memuat Rincian Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam waktu satu tahun.
- APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa



- Di dalam setiap tahapan siklus perencanaan dan penganggaran dari perencanaan sampai dengan evaluasi juga harus memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

## Checklist Proses PPRG

Tahapan	Checklist
<p><b>Perencanaan anggaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MUSRENBANG Desa/Kelurahan</li> <li>■ MUSRENBANG Kecamatan</li> <li>■ Forum OPD</li> <li>■ MUSRENBANG Kabupaten/Kota</li> <li>■ MUSRENBANG Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pastikan dalam setiap tahapan musrenbang (pra musrenbang-musrenbang-musrenbang), ada keterwakilan perempuan dan kelompok marginal lainnya dan tindakan afirmasi positif tentang keterlibatan mereka dalam musrenbang. Keterlibatan dari mulai akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.</li> <li>■ Lakukan persiapan secara matang bersama dengan kelompok warga untuk menyusun program yang responsif gender sebelum terlibat secara langsung dalam musrenbang.</li> <li>■ Pastikan pembagian peran yang tepat, siapa yang menyiapkan materi usulan/program, apa saja argumennya, siapa yang akan berbicara di dalam forum dengan memperhitungkan waktu yang cukup.</li> </ul>
<p><b>Penyusun anggaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ KUA - PPAS</li> <li>■ RAPBD</li> <li>■ RKA - OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tahapan ini dilakukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dimana warga sangat jarang dapat terlibat secara langsung.</li> <li>■ Lakukan akses dokumen KUA-PPAS, RAPBD dan RKA-OPD kepada pemda setempat dengan mengajukan surat atau jika tersedia secara online dalam website pemerintah dapat diakses melalui website.</li> </ul> <p>Lakukan analisis dokumen yang responsif gender dan diskusikan dengan warga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warga dapat terlibat dengan meminta audiensi kepada TAPD untuk mengetahui proses penyusunan anggaran, apakah sudah disusun anggaran yang responsif gender.</li> </ul> <p><b>Catatan</b></p> <p>Akses dokumen juga dapat dilakukan dengan meminta dokumen program dan kegiatan yang sudah dianalisis gender.</p>

## Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah



- Dalam skema di atas, dapat dilihat keterkaitan antara beberapa tingkatan perencanaan, serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran.
- Perencanaan terkait dengan menentukan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.
- Penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- Dilihat dari agenda waktu (*timeline*), proses perencanaan dilakukan sepanjang bulan Januari-April, sedangkan proses penganggaran dilakukan antara bulan Mei-November setiap tahun.



### Catatan

- Di dalam setiap pendekatan pembangunan baik partisipatif, teknokratis, dan politis harus memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.



## Catatan

- Didalam setiap tahapan siklus perencanaan dan penganggaran dari perencanaan sampai dengan evaluasi juga harus memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Tahapan	Checklist
<b>Pengesahan anggaran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ APBD Murni</li><li>■ DPA-OPD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pantaulah jadwal pembahasan APBD di DPRD, catat jadwalnya, mintalah terlibat dalam pembasan APBD kepada sekretariat DPRD atau dapat langsung hadir dalam sidang pembahasan APBD di DPRD (lihat siklus PPRG)</li><li>■ Lakukan akses dokumen APBD Murni dan DPA-OPD kepada pemda setempat dengan mengajukan surat atau jika tersedia secara online dalam website pemerintah dapat diakses melalui website.</li><li>■ Lakukan analisis dokumen yang responsif gender dan diskusikan dengan warga.</li><li>■ Lakukan dialog dengan OPD dan DPRD, baik formal maupun informal. Misalnya mendatangi OPD atau fraksi dan komisi dalam DPRD.</li></ul>
<b>Pelaksanaan anggaran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ DPA-OPD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Akses dokumen juga dapat dilakukan dengan meminta dokumen program dan kegiatan yang sudah dianalisis gender.</li></ul>
<b>Perubahan anggaran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ APBD Perubahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ APBD perubahan juga dapat dilakukan pemantauan apakah sudah responsif gender atau belum.</li><li>■ Lakukan tahapan yang sama dengan tahapan analisis APBD Murni.</li></ul>
<b>Pertanggung-jawaban anggaran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ APBD Realisasi</li><li>■ Hasil audit laporan keuangan daerah</li><li>■ LKPJ Bupati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lakukan tahapan yang sama dengan tahapan analisis APBD Murni (jadwal pertanggungjawaban anggaran-akses dokumen-analisis-diskusi).</li><li>■ Lakukan advokasi yang sama dengan tahapan APBD perubahan.</li></ul>

## Alur Musrenbang Kecamatan



**Rembug warga:** Identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan di tingkat RW.

**Peserta Rembug Warga terdiri dari:**

- Lurah atau perwakilan dari
- Kelurahan setempat;
- Tim Fasilitasi Rembug Warga;
- Ketua atau pengurus LPMK;
- Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
- Seluruh Ketua RT dan Pengurus RW;
- Tokoh Masyarakat/ Agama/
- Pemuda, perwakilan perempuan, perwakilan warga miskin;
- Kepala Sekolah (SD/ SMP atau sederajat/ SMA atau sederajat)
- swasta atau negeri yang ada di wilayah RW tersebut;
- Pengurus PKK tingkat RT dan RW, pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengurus Posyandu dan Karang Taruna di tingkat RW (jika tidak ada, maka dapat mengundang pengurus Karang Taruna di tingkat RT);
- Peserta lain yang dianggap perlu dan layak ikut dalam Rembug Warga.



### Catatan

- Lakukan persiapan sejak sebelum rembug warga
- Pastikan sudah ada kesiapan dari kelompok perempuan dan marginal untuk terlibat dalam rembug warga

## Alur Perancangan dan Penganggaran Desa



## Apa yang dilakukan warga

Proses	Yang bisa dilakukan warga
<b>Perencanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan masalah kelompok marginal tercantum dalam dokumen perencanaan</li> <li>Memastikan masalah kelompok marginal menjadi masalah prioritas yang harus diselesaikan oleh desa</li> <li>Memastikan pagu indikatif anggaran dalam rencana kerja pemerintah desa (tahunan)</li> </ul>
<b>Penganggaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan masukan tentang APBDesa kepada BPD</li> <li>Mengikuti publik hearing tentang APBDesa</li> </ul>
<b>Pelaksanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala desa bersama kepala seksi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa</li> <li>Memberikan masukan terkait perubahan APBDesa</li> </ul>

Proses	Yang bisa dilakukan warga
<b>Penatausahaan</b>	Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif
<b>Pertanggungjawaban</b>	Meminta informasi, mencermati LPJ, bertanya meminta penjelasan terkait LPJ

## CARA MENGIDENTIFIKASI KESENJANGAN GENDER DI PROSES PPRG

Tahapan	Uraian
<b>Identifikasi kesenjangan gender</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lakukan identifikasi kesenjangan gender dari isu sektoral (Pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, budaya, dll).</li> <li>■ Gunakan instrumen APKM (Akses, partisipasi, kontrol, manfaat) maupun AP (<i>Gender Analysis Pathway</i>)</li> </ul>
<b>Perencanaan anggaran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MUSRENBANG desa/kelurahan</li> <li>■ MUSRENBANG kecamatan</li> <li>■ Forum OPD</li> <li>■ MUSRENBANG kabupaten/kota</li> <li>■ MUSRENBANG provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pastikan dalam setiap tahapan musrenbang (pra musrenbang-musrenbang-musrenbang), ada keterwakilan perempuan dan kelompok marginal lainnya dan <i>affirmative action</i> tentang keterlibatan mereka dalam musrenbang. Keterlibatan dari mulai akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.</li> <li>■ Lakukan persiapan secara matang bersama dengan kelompok warga untuk menyusun program yang responsif gender sebelum terlibat secara langsung dalam musrenbang.</li> <li>■ Pastikan pembagian peran yang tepat, siapa yang menyiapkan materi usulan/program, apa saja argumennya, siapa yang akan berbicara di dalam forum dengan memperhitungkan waktu yang cukup.</li> </ul>

## CONTOH INSTRUMEN KESENJANGAN GENDER DISEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Aspek	Jawaban
Sebutkan masalah pendidikan yang anda rasakan? Jawaban boleh lebih dari satu	
Sebutkan masalah kesehatan yang anda rasakan?	
Di keluarga/rumah, Siapa pihak yang memiliki akses dalam bidang pendidikan dan kesehatan?	
Di lingkungan sekitar, Siapa saja pihak-pihak yang tidak memiliki akses dalam bidang pendidikan dan kesehatan?	
Apa saja faktor penghambat untuk mengakses bidang pendidikan dan kesehatan?	
Apakah anda mengetahui informasi program pendidikan dari pemerintah daerah dibawah ini?	
Apakah anda mengetahui informasi program kesehatan dari pemerintah daerah di bawah ini?	
Darimana anda mengetahui informasi program tersebut?	
Berapa jarak SD/MI dan SMP/MTS dari rumah ke sekolah/madrasah?	
Berapa biaya yang dibutuhkan untuk sekolah (SD, SMP dan SMA)	
Berapa biaya transport yang diperlukan untuk pulang pergi ke sekolah?	
Berapa waktu yang diperlukan untuk ke sekolah?	
Siapa pembuat keputusan untuk melanjutkan sekolah atau tidak?	
Apakah memperoleh KIP/Kartu Indonesia Pintar?	
Apakah manfaat yang dirasakan dari KIP (kartu Indonesia Pintar)?	
Apakah manfaat yang dirasakan dari PKH?	

Aspek	Jawaban
Jarak klinik kesehatan, puskesmas pembantu/ puskesmas dengan rumah	
Berapa biaya yang dibutuhkan untuk berobat ke puskesmas/klinik atau rumah sakit?	
Biaya yang diperlukan untuk mencapai fasilitas layanan kesehatan	
Waktu yang diperlukan untuk mencapai fasilitas layanan kesehatan	
Layanan kesehatan apa yang sering didatangi ?	
Apakah memperoleh KIS/BPJS PBI/BPJS non PBI ?	
Apakah manfaat KIS/BPJS PBI/BPJS non PBI, UHC?	
Apakah mengeluarkan biaya lain selain dokter dan obat, transport jika anda sakit?, Jika ya berapa?	

## CARA TERLIBAT DALAM MUSRENBANG AGAR RESPONSIF GENDER

### **Pendekatan partisipatif dalam proses PPRG dilakukan mulai dari proses MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).**

Musrenbang merupakan bentuk pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan dan dilaksanakan dalam kerangka perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan. Penyelenggara musrenbang di daerah adalah Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal dokumen perencanaan. Di tingkat desa, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

## Checklist Partisipasi perempuan dalam musrenbang (kelurahan/desa/kecamatan).

Aspek	Ya	Tidak
Apakah anda mengetahui jadwal informasi pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang?		
Jika iya, Darimana anda mengetahui jadwal tersebut?		
Apakah informasi mengenai pelaksanaan Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan disampaikan baik kepada warga laki-laki dan perempuan dan kelompok marginal?		
Apakah musrenbang diselenggarakan dalam waktu-waktu yang ramah perempuan dan kelompok marginal?		
Apakah kelompok rentan lainnya juga terfasilitasi dalam musrenbang?		
Berapa jumlah peserta perempuan dalam musrenbang kelurahan yang anda ikuti?		
Apakah dalam daftar hadir peserta ada keterangan mengenai jenis kelamin (laki-laki/perempuan)?		
Apakah perempuan yang hadir dalam acara musrenbang mengikuti acara sampai selesai?		
Bagaimana fasilitator membantu peserta perempuan dan laki-laki untuk benar-benar menyampaikan masalah yang ada di lingkungan mereka?		
Apa kira-kira hambatan bagi perempuan hadir dalam forum ini?		
Apa kira-kira hambatan bagi perempuan hadir dalam forum ini?		
Apakah perempuan yang hadir dalam musrenbang didorong untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya?		
Apakah aspirasi ini dicatat oleh penyelenggara?		
Apakah masalah yang diajukan oleh perempuan diklasifikasikan tersebar dalam berbagai urusan wajib dan pilihan?		
Apakah masalah pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pembahasan?		
Apa saja masalah pendidikan dan kesehatan yang dibahas?		

Aspek	Ya	Tidak
Apakah aspirasi ini dicatat oleh penyelenggara?		
Bagaimana fasilitator membantu peserta perempuan dan laki-laki untuk benar-benar menyampaikan masalah yang ada di lingkungan mereka?		
Apakah usulan-usulan yang anda sampaikan dalam musrenbang kelurahan terutama di bidang pendidikan dan kesehatan?		
Apakah masalah yang diidentifikasi dalam forum ini, dipilah mana yang berasal dari perempuan dan mana yang berasal dari peserta laki-laki?		
Apakah masalah yang diajukan oleh perempuan diklasifikasikan tersebar dalam berbagai urusan wajib dan pilihan?		
Apa peranan perempuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dikaitkan dengan persoalan yang mereka hadapi		
Apakah perempuan lebih percaya diri dan perubahan dalam pola pikir?		
Apakah terjadi peningkatan jumlah perempuan dan kelompok marginal yang hadir?		
Apakah terjadi peningkatan usulan perempuan dan kelompok marginal?		
Apa saja usulan program-program di bidang pendidikan dan kesehatan yang anda sampaikan dalam musrenbang kecamatan?		
Apakah perempuan dipilih menjadi delegasi musrenbang kabupaten/kota?		
Jika iya , berapa jumlahnya?		

## CARA MELAKUKAN ANALISIS APBD DAN APBDESA YANG RESPONSIF GENDER

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas struktur pendapatan dan struktur belanja.**

Aspek	Ya	Tidak
Apakah peranan perempuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dikaitkan dengan persoalan yang mereka hadapi ?		
Apakah perempuan lebih percaya diri?		
Apakah terjadi peningkatan jumlah perempuan dan kelompok marginal yang hadir?		
Apakah terjadi peningkatan usulan perempuan dan kelompok marginal?		
Apa saja program-program yang anda usulkan dalam musrenbang RW dan kelurahan di sektor pendidikan dan kesehatan?		
<b>MUSRENBANG KECAMATAN</b>		
Apakah anda mengetahui jadwal informasi pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang kecamatan?		
Jika iya, darimana anda mengetahui jadwal tersebut?		
Apakah informasi mengenai pelaksanaan musrenbang kecamatan disampaikan baik kepada warga laki-laki dan perempuan dan kelompok marginal?		
Apakah musrenbang diselenggarakan dalam waktu-waktu yang ramah perempuan dan kelompok marginal?		
Apakah kelompok rentan lainnya juga terfasilitasi dalam musrenbang? (anak, lansia, penyandang disabilitas, warga miskin)		
Berapa kira-kira jumlah perempuan yang hadir dalam musrenbang kecamatan?		
Apakah dalam daftar hadir peserta ada keterangan mengenai jenis kelamin (laki-laki/perempuan)?		
Apakah perempuan yang hadir dalam acara musrenbang mengikuti acara sampai selesai?		
Apa kira-kira hambatan bagi perempuan hadir dalam forum ini? (tidak diundang, tidak percaya diri, tidak berani menyampaikan usulan,dll)		
Apakah perempuan yang hadir dalam musrenbang didorong untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya?		

Aspek	Uraian
<p><b>Struktur Umum</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Pendapatan</b> Rp...</li> <li>■ <b>Belanja</b> Rp... <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Belanja Tidak Langsung Rp...</li> <li>■ Belanja Langsung Rp... (-)</li> <li>■ Surplus/Defisit Rp...</li> </ul> </li> <li>■ <b>Pembiayaan</b> Rp... <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Penerimaan Rp...</li> <li>■ Pengeluaran Rp... (-)</li> <li>■ Pembiayaan Netto Rp... (-)</li> </ul> </li> <li>■ <b>SILPA Tahun Berjalan</b> Rp...</li> </ul>
<p><b>Struktur Pendapatan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Pendapatan Asli Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pajak Daerah</li> <li>■ Retribusi Daerah</li> <li>■ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</li> <li>■ Lain-Lain PAD yang Sah</li> </ul> </li> <li>■ <b>Dana Perimbangan</b> <p>Dana Bagi Hasil: Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.(DBH bersumber dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam)</p> <p>Dana Alokasi Umum: dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan APBN. DAU suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan aspek pemerataan dan keadilan.</p> <p>Dana Alokasi Khusus: dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas prioritas nasional. Mendanai kegiatan yang khusus yang diusulkan daerah tertentu.</p> <p><b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Dana</li> <li>Hibah</li> <li>Dana Darurat</li> <li>Dana Penyesuaian dan Dana Otsus</li> <li>Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lain</li> <li>Penghitungan DAU</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Struktur Belanja</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Belanja Tidak Langsung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Belanja Pegawai</li> <li>■ Belanja Bunga</li> <li>■ Belanja Subsidi</li> <li>■ Belanja Hibah</li> </ul> </li> </ul>

## Struktur Belanja

- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- Belanja Tak Terduga
- **Belanja Langsung:**
  - Program :
  - Kegiatan :
  - Belanja Pegawai :
  - Belanja Barang dan Jasa: pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
  - Belanja Modal: komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar dan lain-lain) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan).

Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar.

- Belanja tidak Langsung : Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
- Belanja Langsung: Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
- Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah

lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

- Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

## Analisis Agregat Umum (sumber Dokumen: Ringkasan APBD)

Aspek	Rp
<b>Pendapatan</b>	
Pendapatan Asli Daerah	
Pendapatan Pajak Daerah	
Hasil Retribusi Daerah	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Lain-Lain PAD yang Sah	
<b>Dana Perimbangan</b>	
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus	
<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	
Pendapatan Hibah	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
Dana Penyesuaian Infrastruktur dan lainnya	
<b>Belanja</b>	
Belanja Tidak Langsung	
Belanja Pegawai	
Belanja Bunga	
Belanja Hibah	
Belanja Bantuan Sosial	
Belanja bagi Hasil kepada Pemdes	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes	

Aspek	Rp
Belanja Tidak Terduga	
Belanja Langsung	
Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Surplus/Defisit Daerah	
<b>Pembiayaan Daerah</b>	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
Penerimaan Pinjaman Daerah	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
Penerimaan Piutang Daerah	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
Pembayaran Pokok utang	
Pembiayaan Netto	

## Tahapan Analisis

1.



Masukkan Data APBD kedalam form, hitung perbandingan persentase antara PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total pendapatan.

2.



Lakukan analisis mana sumber pendapatan yang paling besar kontribusinya.

3.



Lakukan analisis sumber PAD, manakah yang paling besar kontribusinya, dari pajak daerah, retribusi daerah atau dari sumber yang lain.



## Tabel Analisis APBD yang Responsif Gender (Belanja)

Kategori	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD
Spesifikasi Gender				
Afirmasi dan kelembagaan PUG				
Umum/kesetaraan gender				
Total Belanja				
Persentase terhadap total belanja APBD				

## Tahapan Analisis

1.



Lakukan entry data dengan melakukan *budget tracking* program dan kegiatan yang berkaitan dengan ARG (nasional dan daerah).

Misal: program untuk perlindungan perempuan dan anak, program untuk penyandang disabilitas, dan lain-lain.

2.



Hitung Rasio Total belanja penanggulangan kemiskinan terhadap total belanja APBD.

Lakukan analisis atas data rasio tersebut, apakah pemerintah sudah cukup responsif gender atau belum.

## Form Analisis Belanja untuk Pejabat

Kategori	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD
Gaji DPRD				Sekwan/DPRD
Belanja perjalanan Dinas DPRD				
Belanja studi banding atau peningkatan kapasitas DPRD				
dst				
Total Belanja				
Rasio Total belanja responsif gender terhadap total belanja APBD				

## Tahapan Analisis

1.



Lakukan *entry* data dengan melakukan *budget tracking* program dan kegiatan yang berkaitan dengan belanja DPRD dan Bupati.

Misal: belanja perjalanan dinas DPRD (dalam dan luar daerah), belanja peningkatan kapasitas DPRD, dan lai-lain.

2.



Hitung Rasio Total belanja DPRD terhadap total belanja APBD. Lakukan analisis atas data rasio tersebut, apakah termasuk pemborosan anggaran atau tidak.

**3.**

Lakukan analisis perbandingan antara belanja yang *pro poor* dan *pro gender* dengan belanja DPRD. Kemanakah kira-kira pemerintah berpihak

**4.**

Contoh Hasil Analisis Belanja *Pro Poor* dan *Pro Gender* dengan belanja untuk Pejabat (APBD Gunungkidul 2014)

Anggaran <i>Pro Poor</i>	Rp	Anggaran <i>Pro Gender</i>	Rp	Anggaran DPRD	Rp
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin	600 juta	Program peningkatan PUG dan anak	220 juta	Program peningkatan kapasitas DPRD	5.9 M
Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	89 juta	Peran serta gender dalam pembangunan	26 juta	Studi referensi pimpinan dan anggota DPRD	2 M
dst					
<b>Total</b>	<b>1.46 M</b>		<b>95 juta</b>		<b>13 M</b>

## CONTOH HASIL ANALISIS PPRG

### Analisis APBD Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kota Semarang tahun 2019

Program Pendidikan Anak Usia Dini	7.172.411.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	241.599.168.200
Program Pendidikan Non Formal	4.024.618.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	122.997.352.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	6.910.352.600
<b>Total</b>	<b>382.703.901.800</b>
<b>Total Belanja Pendidikan</b>	<b>1.096.350.339.983</b>

Rasio belanja program ke masyarakat terhadap total belanja pendidikan	35%
Belanja Langsung	400.825.493.000
	37%

Program	Anggaran (Rp)
Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	9.516.978.000
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit	90.050.000
Pengadaan Alat Alat Kesehatan	11.332.375.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	46.357.800.000
Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	190.816.000
Penyediaan Dana Kegiatan Laboratorium Kesehatan	1.869.933.000
Kegiatan Instalasi Farmasi	695.635.000
Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan Persalinan	787.000.000
Pelayanan Kesehatan Rujukan	6.027.524.000
Pendistribusian Obat Dan Logistik	300.000.000
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	886.118.000
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	158.489.000
Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Dan Kemitraan	101.440.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	646.333.000
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	222.558.000
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	106.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2.531.264.000
Penyehatan Lingkungan	1.900.254.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	453.870.000

Program	Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	81.514.981.000
Pendampingan Jamkesmaskot	1.354.081.000
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	15.455.582.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	75.270.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	218.085.000
Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	47.085.000
Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	46.159.000
Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dan KB	195.705.000
Program Informasi Kesehatan	828.360.000
Program Peningkatan Pelayanan BLU	48.628.061.000
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak Menular	7.110.914.000
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik	387.601.000
Peningkatan Imunisasi	168.949.000
Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang	361.254.000
Pelayanan Pengendalian Penyakit HIV, AIDS dan IMS	128.860.000
Total belanja kesehatan yang ke masyarakat	240.695.384.000
<b>BELANJA DINAS KESEHATAN</b>	<b>400.358.872.726</b>
	60%

## Analisis Musrenbang kelurahan dan kecamatan Kota Semarang

Kelurahan	Kecamatan	Tahun	Usulan Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Sumber Dana
Kalipancur	Ngaliyan	2018	Jaringan perlindungan perempuan dan anak		30 juta	
			Pelatihan pembuatan snack	RW 02	20 juta	

Kelurahan	Kecamatan	Tahun	Usulan Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Sumber Dana
Kalipancur	Ngaliyan	2018	Pelatihan <i>softskill</i> lansia	RW 05	15 juta	
Kalipancur	Ngaliyan	2016	Pembangunan pos Paud dan gedung Serba Guna		10 juta	
		2017	Membuat dan menghias kerudung	RW 11 RT 04	15 juta	
			Pengolahan makanan sehat dan bergizi	RW 11 RT 04	30 juta	
			Pelatihan menjahit	RW 11 RT 04	30 juta	
Tegalsari	Candisari	2019	Kampung tematik bantal guling	RT 03 RW 04	175 juta	Kecamatan alokasi dasar
			KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Sosialisasi PHBS		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Sosialisasi pengolahan limbah sampah		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Sosialisasi PKDRT		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Sosialisasi narkoba		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Sosialisasi administrasi posyandu		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Penyuluhan kanker serviks		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Sosialisasi hukum perkawinan		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Sosialisasi kenakalan remaja		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Sosialisasi pemanfaatan pekarangan		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Sosialisasi hidroponik		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar

Kelurahan	Kecamatan	Tahun	Usulan Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Sumber Dana
			Peningkatan mutu produk telur		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Sosialisasi UMKM		3.8 juta	Kecamatan alokasi dasar
				<b>Total</b>	<b>50 juta</b>	
			Pengadaan tong sampah		10 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Pembuatan taman toga		5 juta	Kecamatan alokasi dasar
			Lapangan olahraga		25 juta	Kecamatan alokasi dasar
Tegalsari	Candisari	2017	Pelatihan pembuatan keripik kacang		25 juta	
			Pelatihan pembuatan jamu gendong		10 juta	
			Pelatihan sablon		7.5 juta	
			Pelatihan menjahit		7.5 juta	
			Wayangan		50 juta	
			Pelatihan hidroponik PKK		51 juta	
			Pelatihan web dan desain grafis		25 juta	
			Liga sepakbola RT/RW		50 juta	
			Pelatihan kerawitan		25 juta	
			Pelatihan ketrampilan manajemen		26 juta	
			Pelatihan UMKM		100 juta	
			Kirab budaya kelurahan		50 juta	
					525 juta	
Tegalsari	Candisari	2018	Data yang tersedia hanya usulan			

Usulan Non-Fisik Kecamatan				
Kecamatan	Kelurahan	Tahun	Usulan Prioritas	Jumlah
Ngaliyan	Kalipancur	16 Feb 2016	Wayangan dalam rangka sedekah desa	70 juta

### Dimana kelompok marginal

(perempuan, masyarakat miskin dan penyandang disabilitas berpartisipasi dan mengakses penyusunan APBDesa)

- Pastikan ada perwakilan kelompok marginal terlibat dalam proses pembahasan oleh BPD
- Pastikan ada undangan *public hearing* (dialog publik) terkait RAPBDesa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.
- Pastikan perwakilan yang hadir membawa usulan kelompok
- Pastikan dalam pos pembinaan kelompok masyarakat dan pos pemberdayaan masyarakat ada alokasinya.
- Pastikan ada sosialisasi dan publikasi perdes tentang APBDesa yang bisa dilihat oleh publik.

### Apa yang perlu dilakukan warga dan kelompok marginal dalam tahapan ini?

- Pastikan RAB yang diajukan sesuai dengan yang direncanakan oleh kelompok masyarakat
- Pastikan bahwa pembayaran yang dilakukan bendahara, sesuai dengan RAB yang ada setelah dipotong pajak.
- Tidak diperbolehkan ada pembayaran kepada petugas (sekretaris desa, kepala desa, bendahara atau perangkat desa lainnya) atau warga tidak boleh membayar petugas.

# BAGIAN 03



## PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG

Aspek Kinerja	Pertanyaan	Contoh Indikator
<b>Proses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apakah persiapan dan pelaksanaan PPRG berjalan dengan lancar (kegiatan)?</li> <li>■ Apa <i>output</i> pelaksanaan PPRG ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jumlah/persentase dari program di RPJMD/ RKPD yang responsif gender (integrasi gender dalam perencanaan daerah)</li> <li>■ Jumlah/ persentase program Renstra dan Renja suatu SKPD yang responsif gender (integrasi gender dalam perencanaan SKPD)</li> </ul>
<b>Hasil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apakah PPRG menghasilkan anggaran daerah yang lebih responsif gender?</li> <li>■ Bagaimana status realisasi anggaran yang responsif gender?</li> <li>■ Apakah terjadi peningkatan koherensi antara perencanaan dan penganggaran untuk program yang responsif gender?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jumlah/persentase kegiatan responsif gender yang telah dilaksanakan sesuai dengan TOR (realisasi kegiatan)</li> <li>■ Jumlah dana yang telah direalisasikan berdasarkan TOR responsif gender (realisasi DPA)</li> </ul>
<b>Dampak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apakah kontribusi PPRG pada implementasi Strategi PUG?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pemantauan Indikator Kinerja Utama tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemajuan kesetaraan gender</li> <li>● Perbaikan kondisi hidup untuk laki dan perempuan</li> </ul> </li> </ul>

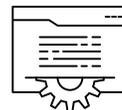
# STRATEGI ADVOKASI PPRG

## Ranah Kebijakan



- Menciptakan ruang untuk menciptakan kesepahaman antar pihak (masyarakat, eksekutif, dan legislatif).
- Membangun komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dengan pengambil kebijakan.
- Mendorong munculnya kebijakan yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan Memetakan kekuatan politik

### 01 Dialog publik dan *lobby*



- Sebagai proses belajar dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- Perlu melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas dalam penyusunan naskah akademik dan peraturan perundangan.
- Mendorong munculnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
- Mempunyai kemampuan analisis dan membangun jaringan antar pihak.
- Memanfaatkan momentum yang tepat

### 02 *Legal drafting*



- Mendapatkan dukungan massa yang lebih banyak, sehingga mempunyai kekuatan atau nilai tawar yang cukup tinggi, tetapi harus hati-hati terhadap "penyusup/pengkhianat".

### 03 Demonstrasi



- Menimbulkan respon yang tinggi dari publik atas suatu persoalan yang diangkat.
- Membangun media sendiri atau harus selektif dalam memilih media.
- Membangun hubungan yang lebih dekat dengan media massa.
- Mempunyai kemampuan untuk menyampaikan atau menuliskan persoalan yang akan diangkat.

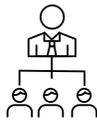
## 04 Publikasi



- Sebagai upaya awal untuk menyusun strategi advokasi.
- Peluang keberhasilan advokasi lebih besar karena mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak.
- Harus selektif dalam memilih pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam jaringan.

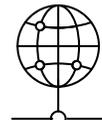
## 05 Membangun Jaringan atau Koalisi

### Di Ranah Komunitas



- Membangun kesadaran kritis dan kekuatan masyarakat dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhannya.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, monitoring sampai dengan evaluasi.
- Menumbuhkan kesepahaman atas persoalan dan kebutuhan antar kelompok masyarakat.

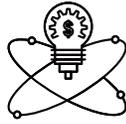
## 01 Pengorganisasian



- Terbangunnya kekuatan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhannya
- Merupakan bagian awal kegiatan advokasi.

## 02 Membangun Jaringan

## Kerja-Kerja Pendukung



- Riset yang dilakukan secara partisipatif akan menghasilkan informasi yang akurat sebagai pendukung langkah advokasi

### 01 Riset



- Sebagai pendukung kerja-kerja advokasi dalam penyediaan data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Data mudah diakses dan dipahami oleh berbagai pihak
- Merupakan bagian awal kegiatan advokasi.

### 03 Pangkalan Data



- Investigasi akan menghasilkan informasi yang akurat sebagai data untuk merumuskan dan menentukan strategi advokasi.
- Memperbanyak dukungan dan memperluas jaringan.

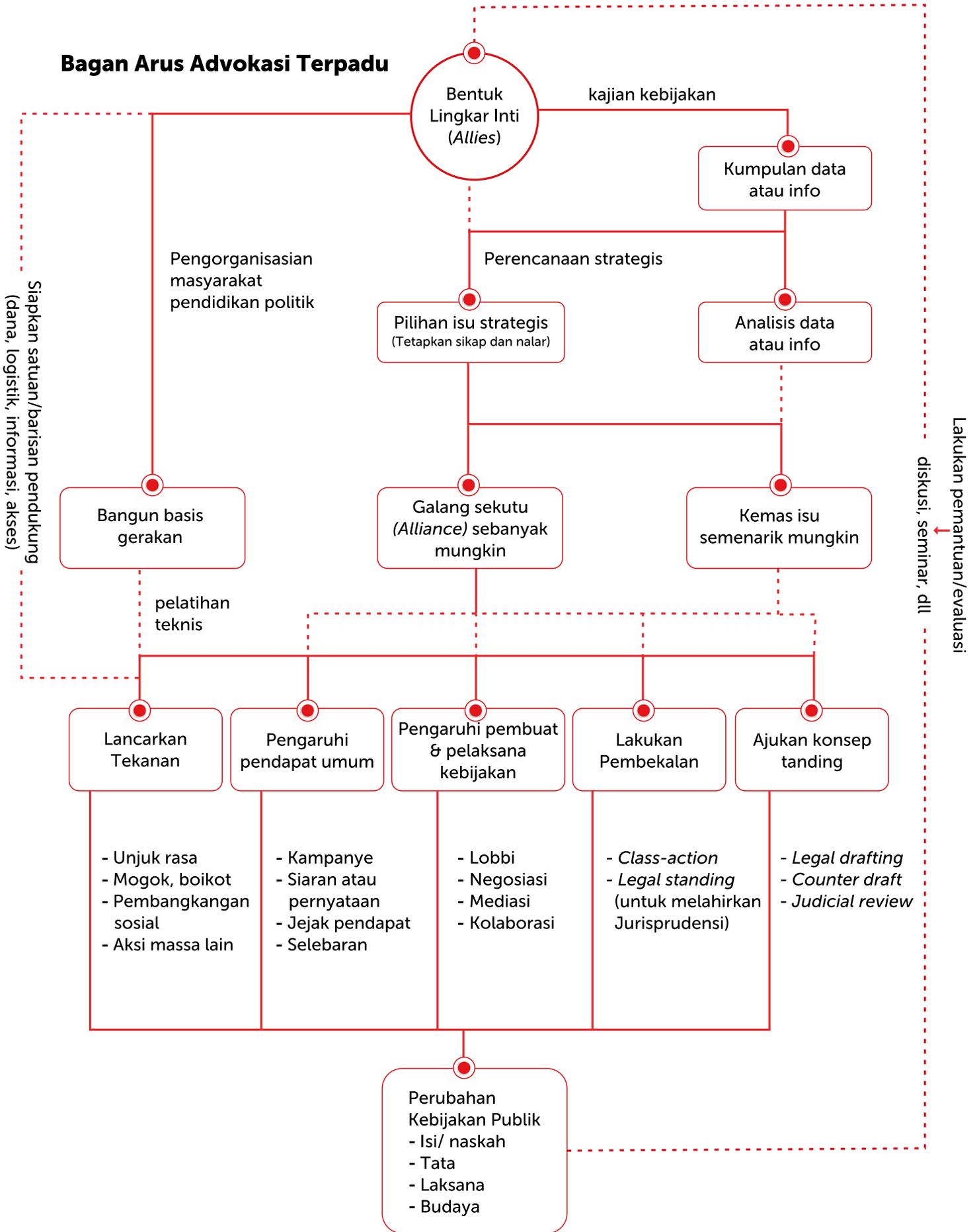
### 02 Investigasi Khusus



- Memperbanyak dukungan dari publik dan mempengaruhi publik, publikasi proses advokasi dan hasil advokasi

### 04 Kampanye

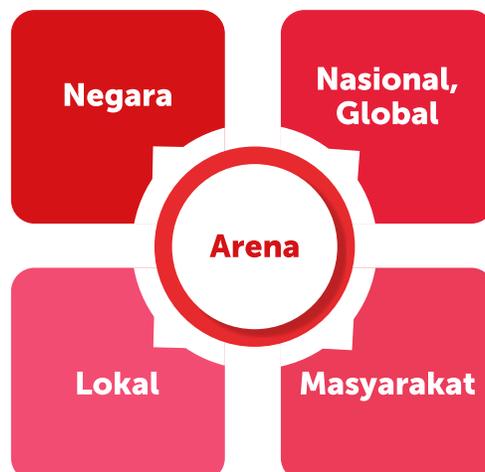
# Bagan Arus Advokasi Terpadu



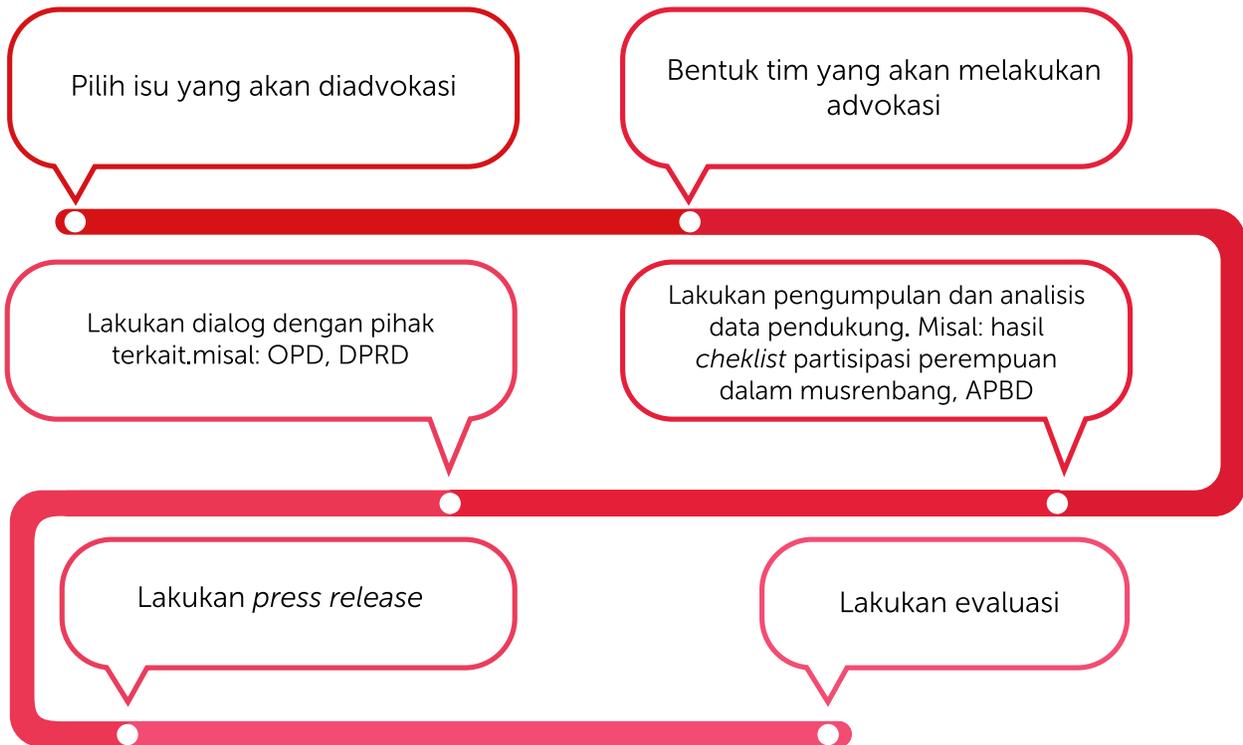
## AKTOR ADVOKASI PPRG



## ARENA ADVOKASI PPRG



## TAHAPAN ADVOKASI PPRG



## INTEGRASI GENDER DALAM MUSRENBANG



# IDENTIFIKASI LANGKAH PROMOSI PPRG

Dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten

Diskusikan aspek-aspek promosi PPRG di tingkat eksekutif, DPRD, dan pihak lain-lain yang ingin didekati:

<p>Siapa aktor kunci dalam eksekutif, DPRD atau pihak lain yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran?</p>	<p>Strategi/metode/langkah apa yang telah dilakukan untuk mempromosikan PPRG kepada pihak tersebut? Siapa pelaku advokasi untuk masing-masing langkah ini?</p>
<p>Strategi/metode/langkah apa yang masih kurang dan harus dilakukan untuk mempromosikan PPRG kepada pihak ini agar berjalan efektif? Siapa pelakunya?</p>	<p>Dukungan seperti apa yang diperlukan bagi promotor PPRG? Apakah perlu penguatan kapasitas, penyediaan bahan, dll?</p>

## Perencanaan dan Penganggaran

	Perencanaan	Penganggaran
<p>Aktor kunci yang harus didekati (pemerintah, DPRD, perusahaan, media, LSM, dll)</p>		
<p>Strategi/metode advokasi yang telah dilakukan dan Pelaku advokasi</p>		
<p>Strategi/metode advokasi yang perlu dikembangkan agar lebih efektif dan Pelaku advokasi</p>		
<p>Dukungan kepada promotor yang diperlukan</p>		

## Form Rencana Tindak Lanjut

Agenda Perubahan	Kebutuhan	Sumber Daya	Waktu	Penanggung-jawab



## Catatan untuk CO

- Lakukan identifikasi target perubahan sesuai kebutuhan (jangka pendek, menengah dan panjang).
- Lakukan identifikasi aktor pendukung dan penghambat dengan cermat dari mulai tingkat internal kelompok, desa, kecamatan, kabupaten/kota, dst. Siapa pihak-pihak yang dapat diajak bekerjasama dan berkolaborasi.
- Lakukan identifikasi sumber daya yang tersedia dan strategi memperoleh dukungan sumber daya.
- Susunlah tahapan advokasi PPRG berdasarkan hasil identifikasi, waktu yang tersedia dan siapa yang bertanggung jawab.
- Pantau dan kawal proses advokasi PPRG dengan seksama.
- Lakukan evaluasi dan refleksi secara berkelanjutan atas hasil advokasi PPRG.